

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang signifikan bagi rakyat, dan juga harus dilakukan untuk penerimaan negara, yang bersifat memaksa dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk penerimaan negara itu sendiri (Sawitri et al., 2022). Mengingat pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan .

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan. Jadi sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sehingga berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting menjadikan pemerintah menarik pajak setinggi-tingginya (Na'diyah, 2020).

Dalam upaya meringankan beban perusahaan, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat

(2b). Bukan hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Upaya dalam melakukan pengoptimalan sektor pajak bukan tanpa kendala. Kendala yang sering dihadapi antara lain penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat bertahan dalam pasar global, khususnya untuk industri manufaktur di Indonesia. Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga harus mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. . Selama beberapa waktu, nilai suatu perusahaan dapat ditingkatkan melalui manajemen laba. . Manajer dapat memengaruhi jumlah laba yang dihasilkan saat mereka menyusun laporan keuangan.

Tindakan yang dilakukan manajer ketika menggunakan pertimbangan dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan memiliki tujuan memanipulasi besaran laba kepada kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) tergantung pada angka-angka yang dihasilkan (Yahaya et al.,2020). Tindakan yang dilakukan manajer ketika

menggunakan pertimbangan dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan memiliki tujuan memanipulasi besaran laba kepada kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) tergantung pada angka-angka yang dihasilkan. Manajemen laba atau yang sering disebut earning management. manajemen laba adalah proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengatur pelaporan laba pada tingkat tertentu.(Setiowati et al., 2023).

Manajemen laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengubah metode akuntansi dan mengubah estimasi dan kebijakan akuntansinya. Manajemen laba merupakan masalah yang sering muncul dalam setiap perusahaan. Permasalahan ini sulit untuk dihindari karena menyangkut adanya keuntungan individu semata dan juga keuntungan perusahaan. Fenomena yang terjadi walaupun pemerintah sudah memberikan penurunan insentif pajak bagi perusahaan, fakta menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang berusaha untuk menghindari pajak di Indonesia.

Laba seringkali dijadikan indikator untuk mengukur kinerja operasional perusahaan, mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang diterapkan (Purwai,2021). Laba yang dihasilkan perusahaan adalah salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kreditur dan investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan earning power, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. Laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan bagian penting dari laporan keuangan. Laba dijadikan sebagai

dasar pengambilan keputusan oleh investor dan kreditur (Septiano et al., 2022). Penelitian ini dapat dilihat dari sampel perkembangan perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2020-2023. Berikut ini beberapa data manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2022-2023.

Tabel 1. 1 Manajemen Laba
Daftar Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman terbaik di Indonesia

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN				RATA-RATA
		2020	2021	2022	2023	
1	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	-0,0065	-0,0267	-0,0379	-0,0140	-0,0844
2	Indofood Sukses Makmur Tbk.(INDF)	-1,3321	-0,7930	-0,7355	-0,7418	-3,6024
3	Mayora Indah Tbk. (MYOR)	-0,5729	-0,4688	-0,4551	-0,6438	-2,1406
4	Ultrajaya Milk Industry & Trad (ULTJ)	-0,0629	-0,0589	0,0384	-0,0832	-0,2434
5	PT Ultra Jaya Milk Industry & Tranding Company ,Tbk (UNVR)	-0,3178	-0,3383	-0,3748	-0,3593	-1,3902

Sumber : www.Idx.co.id (data diolah)

Demikian data tersebut belum dikatakan maksimal bagi perusahaan manufaktur terkhusus sub sektor makanan dan minuman periode 2020-2024, karena pada faktanya kenaikan manajemen laba dari periode ke periode mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Pada periode 2020 ke 2021 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman mengalami penurunan dari -1,2903 menjadi -0,0561 dan pada periode 2022 ke 2023 juga mengalami kenaikan yang signifikan dari -0,2680 menjadi -0,2756.

Fenomena tersebut menandakan bahwa perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2022-2024 cenderung tidak bisa menjaga

manajemen labanya. Sejalan dengan ini, praktik dari pencapaian manajemen laba memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka diperlukan serangkaian strategi dalam rangka pencapaian manajemen laba yang maksimal. Hal tersebut menjadikan para investor untuk lebih hati-hati untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan yang mereka pilih pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

Di Indonesia manajemen laba sudah lama muncul, beberapa kasus manajemen laba yang diduga terjadi pada pelaporan akuntansi secara luas diantaranya yaitu, pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, di mana laporan hasil investigasi berbasis fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA pada tanggal 12 Maret 2019. Ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai Rp. 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp. 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi). Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp. 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISA. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (*disclosure*) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang relevan (Agustina, 2022).

Kasus manajemen laba yang terbaru adalah kasus PT. Indofarma Tbk (INAF) yang ditulis oleh Romys Binekasri pada 27 Mei 2024. PT. Indofarma dan anak

perusahaannya sedang tersangkut kasus indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 371,8 miliar. Kasus ini muncul setelah Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Investigatif atas pengelolaan keuangan tersebut diserahkan oleh wakil ketua BPK, Hendra Susanto kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI. PT. Indofarma Tbk dan anak perusahaan melakukan modifikasi laporan keuangannya. Pembukuan laba pada tahun 2020 yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih hanya senilai Rp. 27,58 juta menurun 99,65% atau nyaris 100% dari periode tahun 2019 sebesar Rp. 7,96 miliar. Tidak hanya itu, pada tahun 2021, Indofarma mencatat rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp. 37,58% dari sebelumnya masih mencatat laba sebesar Rp. 27,58 juta pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2022 perusahaan masih menderita kerugian sebesar Rp. 428 miliar, kerugian ini meningkat sebesar 1.056% secara tahunan dari sebelumnya hanya rugi sebesar Rp 37,58 miliar pada tahun 2021. Hingga Semester I tahun 2023, Indofarma membukukan rugi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk Rp 120,34 miliar dari sebelumnya Rp 90,71 miliar. Sehingga pada tahun 2023 berdasarkan hasil audit BPK ditemukan adanya indikasi praktik fraud dalam PT. Indofarma Tbk (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Kasus manajemen laba lainnya yaitu pada PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk. Pada tahun 2021 PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk diduga melakukan manajemen laba karena ketidak sesuaian laporan keuangannya, dimana PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk mencatatkan laba sebesar Rp. 447,75 miliar sementara pendapatannya mengalami penurunan dan pembekakan pada beban pokok pendapatannya. Penurunan

pendapatannya yaitu sebesar 6,04% dari tahun sebelumnya baik pendapatan sewa pusat perbelanjaan maupun sewa perkantoran. Sedangkan beban pokok pendapatan membengkak sebesar 3,29% (Mie, 2023).

Dari beberapa kasus manajemen laba yang masih terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta beberapa kajian yang dilakukan berbagai peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak stabil, penelitian terkait manajemen laba masih layak untuk dikaji. Kajian ini memiliki tujuan agar mendapatkan data dan fakta mengenai pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap manajemen laba.

Terdapat banyak faktor yang menjadi motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba, diantaranya yaitu perencanaan pajak (*Tax Planning*) langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *Tax Avoidance* (Antari Yuliana et al., 2023).

Perencanaan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Perencanaan pajak yaitu salah satu fungsi dari manajemen pajak guna memperkirakan besarnya pajak yang akan dibayar serta hal-hal yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak dan menghindari pajak. Perusahaan termotivasi melakukan perencanaan pajak yaitu digunakan untuk melakukan penghematan pajak agar dapat pembayaran pajak lebih kecil yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perpajakan. Hal tersebut agar upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan undang-undang pajak yang berlaku, dan sama sekali tidak bertujuan untuk memanipulasi perpajakan tetapi untuk memanfaatkan peluang dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah, karena cara yang digunakan legal. Perencanaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba (Handayani & Utami, 2024).

Selain faktor perencanaan pajak yang dapat mempengaruhi manajemen melakukan manajemen laba yaitu beban pajak tangguhan. Beban Pajak Tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan (Handayani & Utami, 2024). Beban pajak tangguhan diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Beban pajak panghasilan dikelompokan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Pajak secara final, dan adanya non deductible expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan)(Antari Yuliana et al., 2023).

Beban pajak penghasilan di hitung dengan menggunakan aturan perpajakan atas hasil usaha perusahaan selama periode tahun yang bersangkutan. Aturanaturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan koreksi fiskal karena terdapat perbedaan antara konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep

biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan. Aturan perpajakan tetap menggunakan data dan informasi akuntansi yang telah diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan sebagai dasar untuk menentukan koreksi-koreksi tersebut berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku(Antari Yuliana et al., 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah penghindaran pajak , Penghindaran pajak adalah suatu upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Masalah penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang kompleks, karena penghindaran pajak merupakan hal yang di perbolehkan namun tidak diinginkan. Dalam pemerintahan Indonesia telah di buat beberapa peraturan yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut yaitu merupakan transfer pricing (Azhara, Eprianto, & Marundha, 2023). Tindakan penghindaran pajak dengan memperkecil beban pajak justru meningkatkan terjadinya manajemen laba di perusahaan. Penghindaran pajak berpengaruh terhadap manajemen laba karena motivasi pajak dalam manajemen laba salah satunya dengan meminimalkan pajak(Ayem & Ongirwalu, 2020).

Selain dari faktor-faktor di atas masih ada satu faktor lagi yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan adalah variabel moderasi. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan di indikatorkan sebagai *Logaritma natural of Total assets*. Ukuran perusahaan menunjukkan aktivitas perusahaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin besar aktiva yang bisa dijadikan jaminan

untuk memperoleh hutang sehingga hutang akan meningkat. Perusahaan besar biasanya mampu membayarkan rasio dividen yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil dan menaikkan nilai perusahaan sehingga banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki prospek yang baik(Akbar & Fahmi, 2020).

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya skala perusahaan. Ukuran perusahaan berkaitan dengan besarnya perusahaan yang diukur berdasarkan total aset. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode auntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil(Tamara et al., 2022). Ukuran perusahaan akan berkaitan dengan seberapa besar atau kecilnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak, Beban pajak tangguhan,penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) mampu mempengaruhi manajemen laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul yaitu:**“Manajemen Laba Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : Perencanaan Pajak ,Beban Pajak Tangguhan Dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan yang harus diminimalisir demi mengoptimalkan laba perusahaan.
2. Adanya kendala pemerintah dalam melaksanakan pengoptimalan sektor pajak.
3. Fakta menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang berusaha untuk menghindari pajak di Indonesia.
4. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah.
5. Dari perencanaan pajak dapat mengetahui informasi untuk menunjukkan aktivitas perencanaan pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dengan asumsi benefit lebih besar daripada cost-nya.
6. Dari beban pajak tangguhan dapat mengetahui informasi pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan pada pengembalian pajak lebih tinggi daripada beban pajak penghasilan pada laporan keuangan.
7. Banyaknya perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang tinggi akan melaporkan laba yang lebih rendah.
8. Manajemen laba merupakan tindakan manipulatif oleh manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih menguntungkan.
9. Perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal,

namun praktik ini bisa disalahgunakan sebagai sarana manipulasi laba.

10. Beban pajak tangguhan muncul dari perbedaan waktu pengakuan akuntansi dan perpajakan. Ini bisa menjadi alat bagi perusahaan untuk memanipulasi laba pada periode tertentu.
11. Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk strategi untuk menurunkan kewajiban pajak, namun sering kali diiringi dengan praktik manipulasi laporan keuangan.
12. Ukuran perusahaan sering diasumsikan dapat mempengaruhi kekuatan atau kelemahan pengaruh variabel-variabel seperti perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan tax avoidance terhadap manajemen laba.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada pada identifikasi masalah di atas, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, adanya pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian memfokuskan pada pembahasan atas **Perencanaan Pajak (X1)** ,**Beban Pajak Tangguhan (X2)** ,**Tax Avoidance (X3)** , **Manajemen Laba (Y)** , **Ukuran Perusahaan((Z))**.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020-2024?

2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020- 2024?
3. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020- 2024?
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020- 2024?
5. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020- 2024?
6. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap manajemen laba yang dimoderasi ukuran perusahaan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI periode 2020- 2024?

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meminimalisir tindakan manajemen laba serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja

manajemen dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademisi Mampu memberikan referensi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang serta kampus-kampus lainnya. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.